

# IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DONO ARUM KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

Nurlatifah Hidayati, R. Gunawan Sudarmanto, Irawan Sunoro  
FKIP Unila, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

E-Mail: [nurlatifah\\_hidayati78@yahoo.com](mailto:nurlatifah_hidayati78@yahoo.com)  
+6285357900888

**Abstract: Implementation of Minimum Service Standards Education in 2<sup>nd</sup> Dono Arum National Primary School, Seputih Agung District, Lampung Tengah Region.** This study used a qualitative approach with case study design. Data collection techniques used in this study are interviews, documentation and observation. The results of the study are as follows: (1) The SPM in Primary School has been running based on the regulations set by the Indonesian which on the average meets the criteria for determining the appropriate SPM stated in the Minister of Education's Regulation No. 15 of 2010, (2) The evaluation of SPM's implementation at Primary School has been involving all stakeholders, (3) The obstacles encountered in the implementation of SPM in is the less active community participation and the lack of communication between parents and the school, (4) the support community participation in the implementation of SPM (Minimum Service Standard of Education) in Primary School is less maximum, while the principal support in the form of moral and material supports are maximum.

**Keywords:** *implementation of minimum service standards of education, the involvement of stakeholders.*

**Abstrak: Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 2 Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) SPM di Sekolah Dasar telah berjalan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Indonesia yang rata-rata memenuhi kriteria untuk menentukan SPM sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 15 tahun 2010, (2) evaluasi pelaksanaan SPM di sekolah Dasar telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di adalah partisipasi masyarakat kurang aktif dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan sekolah, (4) partisipasi masyarakat dukungan dalam pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal Pendidikan) di Sekolah Dasar kurang maksimal, sementara dukungan utama dalam bentuk dukungan moral dan material maksimum.

**Kata kunci:** *implementasi standar pelayanan minimal pendidikan, keterlibatan stakeholder*

Sekolah Dasar dituntut memiliki prestasi yang patut dibanggakan baik dalam bidang akademis maupun non akademis. Hal ini merupakan indikator dari pelaksanaan manajemen yang baik, karena pengelolaan manajemen sekolah yang baik merupakan indikator ketercapaian pelaksanaan delapan standar pendidikan yang akhirnya akan bermuara pada pencapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan.

Harapan dari semua itu adalah meningkatnya mutu pendidikan.

Kegiatan pelaksanaan manajemen pendidikan di Sekolah Dasar adalah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terlihat dari proses manajemen pendidikan baik dari proses pendidikan, pembiaayaan pendidikan dan sarana pendidikan yang terlihat nyata. Pengelolaan pembiaayaan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena

dalam penyusunan RAKS Kepala Sekolah melibatkan Komite Sekolah dan Guru. Sembilan puluh persen sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung tersedia dengan baik. Hal lain yang menarik dalam kegiatan Manajemen berbasis sekolah di Sekolah Dasar dalam pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) satuan pendidikan adalah peran aktif wali murid dalam organisasi paguyuban kelas, yang mana paguyuban kelas di bentuk setiap kelas. Sekolah sangat terbantu dengan dibentuknya paguyuban kelas, hal ini mempermudah pihak sekolah menyampaikan program-program sekolah.

tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (a) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar. (b) Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar. (c) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar. (d) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar melibatkan Peran Serta Masyarakat. (e) Dukungan dari *stake holder* dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia enam tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan Dasar. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a)

Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten / kota: **Pertama**, Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. **Kedua**, Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. **Ketiga**, di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. **Keempat**, di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. **Kelima**, di setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satauan pendidikan. **Keenam**, Di setiap SMP/MTs tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. **Ketujuh**, di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. **Kedelapan**, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kwalifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. **Kesembilan**, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. **Kesepuluh**, di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik. **Kesebelas**, di setiap kabupaten / kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. **Keduabelas**, di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. **Ketigabelas**, Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan **Ketigabelas**, Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

(b) Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan: **Pertama**, setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. **Kedua**, Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap set untuk setiap peserta didik. **Ketiga**, Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan topik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; **Keempat**, Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. **Kelima**, Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. **Keenam**, Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut kelas I-II, 18 jam perminggu; Kelas III, 24 jam perminggu; Kelas IV-VI, 27 jam perminggu; Kelas VII-IX, 27 jam perminggu; Satuan pendidikan menerapkan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; **Ketujuh**, Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; **Kedelapan**, Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; **Kesembilan**, Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; **Kesepuluh**, Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; **Kesebelas**, Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/ kota pada setiap akhir semester; dan **Kesebelas**, Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Standar Pelayanan Minimal dicanangkan sebagai tingkatan minimum layanan pendidikan, berlaku untuk: (1) satuan atau program pendidikan, (2) penyelenggara satuan atau program pendidikan, (3) pemerintahan kabupaten/kota, dan (4) pemerintahan propinsi. Namun demikian, dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, kapasitas sumber daya serta kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi layanan-layanan: (1) merupakan tanggung jawab langsung Pemerintah/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi); (2) Yang merupakan tanggung jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang atau Dinas

Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota).

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dikembangkan sejalan dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, serta instrumen Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan standar yakni standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi pendidikan dan kompetensi lulusan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus multi situs. Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri 2 Dono Arum di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Waktu pelaksanaan dari bulan Mei sampai dengan September 2012. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut : (1) Kepala Sekolah, (2) Guru Kelas V, (3) Ketua Komite, (4) Wali murid, (5) Kepala UPTD Kecamatan Seputih Agung, (6) Pengawas sekolah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Gambaran Latar Penelitian**

SD Negeri 2 Dono Arum beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 212 Dono Arum Kecamatan Seputih Agung berdiri sejak tahun 1986, mempunyai Letak sangat strategis, siswa tidak hanya berasal dari

sekitar lingkungan sekolah tepatnya Desa Dono Arum, tetapi banyak dari luar Desa Dono Arum, hal ini menunjukkan bahwa SD Negeri 2 Dono Arum sudah menjadi tujuan masyarakat Kecamatan Seputih Agung untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 2 Dono Arum, masyarakat percaya dengan kualitas pendidikan yang dicapai SD Negeri 2 Dono Arum.

### **Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum**

kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum, meliputi kegiatan yang mengacu pada pelayanan terselenggaranya kegiatan yang meliputi: Tersedianya Buku Teks Pelajaran, tersedianya Alat-Alat Peraga Pembelajaran, tersedianya Buku Referensi dan Buku Pengayaan, beban Kerja Guru SD N 2 Dono Arum, penyelenggaraan Proses Pembelajaran SD N 2 Dono Arum, kurikulum SD N 2 Dono Arum, pengembangan Silabus dan RPP SD N 2 Dono Arum, pengembangan Program Penilaian SD N 2 Dono Arum, program Supervisi SD N 2 Dono Arum, pelaporan Hasil Evaluasi Belajar Siswa, dan penerapan Prinsip-Prinsip MBS

### **Evaluasi Pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum**

Kegiatan evaluasi pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum dilakukan untuk tujuan perbaikan dan menentukan kebijakan yang akan datang. Kegiatan evaluasi terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah yang terlibat dalam kegiatan evaluasi SPM, bentuk pelaksanaan evaluasi SPM, waktu pelaksanaan SPM, laporan evaluasi SPM dan kendala serta cara mengatasi kendala pelaksanaan SPM. Komponen Yang Terlibat Dalam Kegiatan SPM, bentuk Pelaksanaan Evaluasi SPM, pelaksanaan Evaluasi di SD N 2 Dono Arum, pelaporan Evaluasi Pelaksanaan SPM.

### **Kendala Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum**

Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sudah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala yang dihadapi, dan kendala-kendala tersebut masih bisa diselesaikan, kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan SPM, cara Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan SPM.

### **Keterlibatan Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum**

Keterlibatan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sudah mulai ada, walaupun kurang maksimal keterlibatannya.

### **Dukungan Stake Holder dalam Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum**

Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum didukung oleh semua pihak (*stake holder*) dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya,

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum**

kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum, meliputi kegiatan yang mengacu pada pelayanan terselenggaranya kegiatan yang meliputi: (1) Tersedianya Buku Teks Pelajaran. SD Negeri 2 Dono Arum menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, tidak hanya buku-buku tersebut di atas, SD Negeri 2 Dono Arum juga sudah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap set untuk setiap peserta didik. (2) Tersedianya Alat-Alat Peraga Pembelajaran. Ketersediaan alat-alat peraga pembelajaran sangat penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran di SD N 2 Dono Arum, untuk itu sekolah

berusaha mewujudkan alat-alat peraga pembelajaran tersebut berupa satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan topik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. (3) Tersedianya Buku Referensi dan Buku Pengayaan. Buku referensi dan buku pengayaan sangat diperlukan sebagai tambahan referensi dan pengayaan pembelajaran baik bagi siswa maupun guru. SD N 2 Dono Arum mewujudkan semua itu dengan cara selalu menambah koleksi buku-buku di perpustakaan. (4) Beban Kerja Guru SD N 2 Dono Arum. Salah satu komponen pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum adalah beban wajib kerja guru yang sudah ditetapkan dalam SPM yaitu setiap guru tetap di SD Negeri 2 Dono Arum bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Dan ini sudah terpenuhi di SD N 2 Dono Arum. (5) Penyelenggaraan Proses Pembelajaran SD N 2 Dono Arum. Proses penyelenggaraan pembelajaran di SD N 2 Dono Arum telah dilaksanakan sesuai dengan acuan dalam SPM yaitu SD Negeri 2 Dono Arum menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: Kelas I-II, 18 jam perminggu; Kelas III, 24 jam perminggu; Kelas IV-VI, 27 jam perminggu; (6) Kurikulum SD N 2 Dono Arum, Kurikulum yang dipakai di SD N 2 Dono Arum adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD N 2 Dono Arum, yang mana penetapannya sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu, mealai pembentukan tim pengembang kurikulum untuk bekerja membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD N 2 Dono Arum, dan kemudian disahkan oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. (7) Pengembangan Silabus dan RPP SD N 2 Dono Arum. Dalam melaksanakan tugas mengajar setiap guru di SD N 2 Dono Arum mengembangkan sendiri silabus dan RPP

dari standar isi, melalui kegiatan KKG. (8) Pengembangan Program Penilaian SD N 2 Dono Arum. Salah satu rangkaian indikator terlaksananya pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 adalah pengembangan penilaian yang dilakukan oleh guru, untuk menilai perkembangan peserta didik guru-guru SD N 2 Dono Arum membuat pengembangan program penilaian baik secara kognitif maupun afektif. (9) Program Supervisi SD N 2 Dono Arum. Guna melihat kegiatan belajar mengajar guru-guru di SD N 2 Dono Arum berjalan baik atau tidak, maka kepala sekolah SD N 2 Dono Arum mengadakan program supervisi yang sudah terjadwal. (10) Pelaporan Hasil Evaluasi Belajar Siswa. Langkah yang ditempuh sesuai dengan prosedur pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum adalah pelaporan hasil evaluasi belajar siswa baik kepada kepala sekolah maupun dari sekolah ke Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Tengah sudah dilaksanakan oleh SD N 2 Dono Arum. (11) Penerapan Prinsip-Prinsip MBS. Terlaksananya manajemen sekolah yang baik tidak lepas dari peran serta seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan proses pelaksanaan manajemen di sekolah. SD 2 Dono arum sudah melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan kegiatan di sekolah, sekolah sudah melibatkan semua komponen dari komite sekolah, peran serta masyarakat (PSM), guru, dan pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

### **Evaluasi Pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum**

Kegiatan evaluasi pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum dilakukan untuk tujuan perbaikan dan menentukan kebijakan yang akan datang. Kegiatan evaluasi terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah yang terlibat dalam kegiatan evaluasi SPM, bentuk pelaksanaan evaluasi SPM, waktu pelaksanaan SPM, laporan evaluasi SPM dan kendala serta cara mengatasi kendala pelaksanaan SPM. (1) Pelaksanaan SPM di SD 2 Dono Arum tidak bisa berhasil tanpa

ada komponen yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan SPM, untuk itu di sini akan dipaparkan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum. (2) Bentuk kegiatan evaluasi di SD N 2 Dono Arum berupa kegiatan rewiuw dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di SD 2 Dono Arum, yang mana bentuk kegiatan tersebut untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum. (3) Waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum dilakukan setiap semester sekali, tetapi apabila terjadi permasalahan insidental akan segera dipecahkan masalah tersebut untuk dicarikan solusinya. Hasil evaluasi pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum, dilaporkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum.

### **Kendala Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum**

Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sudah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala yang dihadapi, dan kendala-kendala tersebut masih bisa diselesaikan, pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum kendala yang dihadapi adalah hanya berupa kurangnya keterlibatan wali murid (PSM), mereka hanya mengandalkan komite sekolah dalam pelaksanaan SPM. Kendala di atas dapat diselesaikan walaupun penyelesaiannya belum maksimal, tetapi seluruh komponen SD N 2 Dono Arum berusaha menyelesaikan kendala tersebut melalui Keterlibatan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sudah mulai ada, walaupun kurang maksimal keterlibatannya. Karena bentuk keterlibatan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum belum begitu muncul, dukungan mereka sebatas pada kepengurusan komite sekolah, yang tidak aktif di komite sekolah peran sertanya belum begitu terlihat. Keterlibatan PSM di SD N 2 Dono Arum dalam pelaksanaan SPM belum terlihat maksimal, mereka terlalu mempercayakan semuanya kepada pihak sekolah dan komite sekolah, padahal yang diharapkan oleh pihak sekolah adalah keterlibatan PSM lebih

maksimal lagi dalam pelaksanaan semua kegiatan di sekolah, termasuk diantaranya pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum.

### **Dukungan Stake Holder dalam Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum**

Pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum didukung oleh semua pihak (*stake holder*) dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, dukungan dari PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sangat membantu terlaksananya kegiatan pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum, walaupun dukungannya belum maksimal. Kepala Sekolah sebagai seorang nahkoda dalam suatu sekolah peranannya sangat penting dalam seluruh proses kegiatan di sekolah tersebut, tanpa dukungan dan kehandalan seorang kepala sekolah suatu program kegiatan di sekolah tidak mungkin berjalan dengan baik. Kepala sekolah SD N 2 Dono Arum sangat mendukung kegiatan pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum. Peran pengawas sekolah dan Dinas pendidikan kabupaten Lampung Tengah sangat berarti sekali dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan SPM di SD N 2 Dono Arum, masing-masing sudah ada tupoksi dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum. Peran pengawas sekolah dan Dinas pendidikan kabupaten Lampung Tengah sangat berarti sekali dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan SPM di SD N 2 Dono Arum, masing-masing sudah ada tupoksi dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah, dan beberapa komponen yang ditetapkan berupa tersedianya buku teks pelajaran, tersedianya alat-alat peraga pembelajaran, tersedianya buku referensi dan buku pengayaan, tersedianya buku referensi dan buku pengayaan, beban mengajar guru, dan kurikulum yang dipakai, pengembangan

Silabus dan RPP, Pengembangan program penilaian, program supervisi, pelaporan hasil evaluasi belajar siswa, dan penerapan prinsip-prinsip MBS rata-rata sudah memenuhi kriteria penetapan SPMSMP sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2010.

Evaluasi Pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum melibatkan seluruh *stake holder*, bentuk kegiatan evaluasi berupa rewiuw melalui rapat evaluasi, yang mana waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap semester sekali, dan apabila terjadi hal-hal insidental diadakan rapat, dan pelaporan eavaluasi dilaporkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum adalah kurang aktifnya PSM. Bentuk keterlibatan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum berupa sumbangan materi, dan keterlibatan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum kurang maksimal, mereka lebih mempercayakan segala sesuatunya kepada pihak sekolah dan Komite Sekolah.

Dukungan PSM dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum kurang maksimal, sedangkan dukungan kepala sekolah berupa dukungan moril maupun materiil. Tidak kalah pentingnya peran pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dalam memberikan bimbingan teknis pelaksanaan SPM serta merespon proposal usulan bantuan.

### **Saran**

Kegiatan pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh pihak sekolah dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 yaitu tentang Standar Pelayanan Minimal di tingkat satuan pendidikan dasar, walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan SPM di SD N 2 Dono Arum.

Kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh *stake holder* untuk melaksanakan SPM di SD N 2 Dono Arum,

lebih aktif lagi membangun kerja sama dengan pihak luar (DUDI) untuk menggali dana pengembangan sekolah di samping dana yang diperoleh dari wali murid (PSM), lebih meningkatkan keterlibatan warga sekolah, Peran Serta Masyarakat, komite sekolah, pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan SPM di SD N 2 Dono Arum.

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menunjukkan perkembangan yang pesat, maka guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum hendaknya selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, meningkatkan kemampuan, dan selalu mengkaji kembali program pembelajaran agar senantiasa relevan dengan perkembangan jaman, serta ikut peduli dengan pelaksanaan program kegiatan yang ada di sekolah.

Pengurus komite sekolah diharapkan untuk lebih meningkatkan fungsi dan perannya sebagai mitra SD Negeri 2 Dono Arum agar tercapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Pengurus paguyuban kelas yang sudah terbentuk hendaknya lebih aktif lagi untuk melaksanakan program kegiatan yang membantu pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum.

Pengawas SD Negeri 2 Dono Arum hendaknya lebih meningkatkan fungsi kepengawasannya sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan SPM di SD Negeri 2 Dono Arum untuk mencapai tujuan sekolah.

Dinas pendidikan sebagai penanggung jawab pendidikan di daerah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan SPM, dengan menganggarkan dana untuk peningkatan SPM di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya dan SD Negeri 2 Dono Arum pada khususnya dinas pendidikan sebagai penanggung jawab pendidikan di daerah hendaknya mendorong SD Negeri 2 Dono Arum untuk tetap melaksanakan SPM untuk meningkatkan mutu sekolah dan tujuan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Bandung: Bumi Aksar
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Modul Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*. Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Suharsimi Arikunto & Cipi Safrudin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.